

METODE PENELITIAN SOSIAL EKONOMI (KUALITATIF)

PENDAHULUAN

Dr. Ir. Teguh Kismantoroadji, M.Si.
Dr. Ir. Nanik Dara Senjawati, MP.

*<http://blog.upnyk.ac.id>
email: kismantoroadji@gmail.com*

4
EDISI



RESEARCH DESIGN

Pendekatan
Metode
Kualitatif,
Kuantitatif, dan
Campuran

JOHN W. CRESWELL



PT. GRAHAPEDIA



PEMBERDAYAAN
M A S Y A R A K A T
NELAYAN

Kata Pengantar:

Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS



Ary Wahyono
I G.P. Antariksa
Masyhuri Imron
Ratna Indrawasih
Sudiyono

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada umumnya masyarakat nelayan masih hidup dalam keterbatasan, baik keterbatasan ekonomi, sosial, politik maupun keterbatasan dalam bidang pendidikan. Keterbatasan ekonomi itu nampak pada tingkat pendapatan nelayan yang pada umumnya masih rendah. Memang ada nelayan yang dari segi ekonomi cukup berhasil, namun di samping jumlahnya tidak banyak, juga keberhasilan itu lebih nampak pada mereka yang merangkap profesi sebagai pedagang.

Keterbatasan sosial yang dialami oleh nelayan memang tidak terwujud dalam bentuk keterasingan, karena secara fisik masyarakat nelayan tidak lagi dapat dikatakan terisolasi atau terasing. Keterbatasan sosial lebih terwujud pada ketidakmampuan masyarakat nelayan dalam mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi pasar secara menguntungkan, yang ditunjukkan oleh lemahnya mereka mengembangkan organisasi ke luar lingkungan kerabat mereka atau komunitas lokal

(Boedhisantoso,1999). Karena itulah mereka mengalami nasib terpinggirkan (marginal) dari proses kemajuan.

Ketidakmampuan nelayan mengembangkan organisasi merupakan akibat dari dominasi negara (*state*) yang sangat kuat terhadap masyarakat lokal sehingga pada tahap selanjutnya menyebabkan tatanan masyarakat tidak berkembang dengan baik. Sistem nilai yang dipaksakan berubah dan diterima masyarakat berdasarkan hukum nasional (tertulis) dirasakan tidak membawa rasa keadilan. Organisasi-organisasi kemasyarakatan mulai dari kehidupan rukun tetangga (RT), rukun kampung (RW), lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga partai politik didominasi oleh kepentingan negara daripada kepentingan masyarakat (Nugroho,1998).

Adanya sistem nilai yang dipaksakan dari atas sekaligus juga mengakibatkan terjadinya keterbatasan politik dari masyarakat nelayan, yang terwujud pada tidak dilibatkannya mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, walaupun itu untuk kepentingan mereka sendiri. Sebagai contoh dalam hal ini adalah penentuan pengurus KUD Mina yang tidak dipilih oleh masyarakat nelayan, tetapi ditentukan dari atas. Begitu pula organisasi nelayan seperti HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) yang anggotanya tidak melibatkan para nelayan, tetapi lebih pada organisasi para pengusaha.

Negara modern yang diciptakan di dunia ketiga secara cepat memang meletakkan ideologi pembangunan yang menciptakan proyek-proyek intervensi

dalam upaya menciptakan kemakmuran dan pemerataan dalam masyarakat. Ironisnya, upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan tidak memperhatikan kondisi riil masyarakat, tetapi seringkali didasarkan program-program intervensi dari atas (*top down*). Proyek-proyek intervensi ini pada hakekatnya telah menghancurkan tatanan masyarakat dan komunitas yang sudah ada sebelum negara terbentuk. Proyek-proyek intervensi itu telah mengambil alih berbagai macam hak-hak komunitas dan kepemilikan masyarakat dengan dalih untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional. Pengambilan alih hak-hak masyarakat yang dimiliki secara turun-temurun menyebabkan hilangnya hak-hak atas sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat (Sandjaya, 1999).

Kecenderungan pengkaplingan wilayah perairan laut oleh sebagian pengusaha perikanan yang ditandai dengan semakin banyaknya kapal-kapal besar milik perusahaan-perusahaan perikanan besar maupun asing, merupakan salah satu contoh kebijakan di bidang perikanan yang tidak menguntungkan ataupun melindungi hak-hak nelayan lokal. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikembangkan berkenaan dengan alokasi sumberdaya perikanan lebih memfasilitasi terjadinya akumulasi modal. Kalau kecenderungan ini terus berlangsung maka yang diuntungkan adalah kelompok pemilik modal kuat, sekaligus meminggirkan keberadaan masyarakat lokal.

Adapun keterbatasan pendidikan dapat dilihat pada kondisi sumberdaya manusia yang masih ren-

dah, terutama jika dibandingkan dengan komunitas lain di luar nelayan. Rendahnya kualitas sumberdaya masyarakat nelayan di samping disebabkan oleh jauhnya fasilitas pendidikan dari wilayah mereka – lebih-lebih yang bertempat tinggal di pulau-pulau kecil –, juga (dan ini yang terpenting) disebabkan oleh kondisi ekonomi mereka yang tidak memungkinkan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Menghadapi kenyataan kondisi kehidupan nelayan yang seperti itu maka ada dua pilihan yang dilakukan masyarakat nelayan, yaitu menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan, atau melakukan perlawanan dengan kekerasan. Pilihan pertama tidak mungkin dilakukan mengingat kemiskinan yang dialami dan pendidikan yang dimiliki tidak mampu merespon setiap perubahan sosial ekonomi yang terjadi di sekitarnya. Sebagai contoh adalah kredit perbankan yang sangat sulit diperoleh nelayan tradisional karena tidak adanya agunan. Begitu pula kurangnya modal untuk mengembangkan usaha dan membeli peralatan yang mereka perlukan, serta terbatasnya jaringan sosial yang dimiliki masyarakat nelayan. Dalam kondisi yang demikian maka bentuk-bentuk penyesuaian matapencaharian yang dilakukan oleh nelayan adalah diversifikasi usaha di luar kenelayanan, seperti menjadi tukang becak. Kondisi seperti ini terjadi misalnya di Tegal, Pasuruan dan Tuban. Sedangkan di Lampung, karena alternatif pekerjaan lain hampir tidak ada, maka usaha lain yang dilakukan adalah kecuali berkebun juga bertani, atau menjadi buruh nelayan pada kelompok usaha penangkapan *purse seine*.

Penyesuaian lain yang dilakukan nelayan adalah penggunaan bahan kimia atau peledak dalam kegiatan penangkapan ikan, yang dampaknya sangat merusak habitat ikan dan kerusakan fungsi lingkungan laut. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan kimia ini jelas merupakan jalan pintas dari reaksi ketidakberdayaan menghadapi nelayan yang lebih maju alat tangkapnya. Ketidakberdayaan menghadapi nelayan-nelayan besar sudah barang tentu memunculkan sikap-sikap apatis, radikal, *dispartisipatif* terhadap pembangunan, yang pada gilirannya akan memicu tindak kekerasan sebagai alternatif terakhir. Pembakaran kapal purse seine di Cilacap (Jawa Tengah) dan Belawan (Sumatra Utara) membuktikan bahwa adanya reaksi ketidaksabaran nelayan menghadapi kelangkaan sumberdaya (*environmental scarcity*) yang diakibatkan oleh terkurasnya sumberdaya oleh nelayan besar.

Selama ini para perencana pembangunan selalu bias memandang masyarakat nelayan. Nelayan selalu diperlakukan sama dengan petani atau kelompok masyarakat lainnya. Dalam arti luas, perikanan memang dapat dilihat sebagai bagian dari pertanian, namun jika dilihat dari sistem mata pencaharian, antara nelayan dengan petani menunjukkan perbedaan yang berarti. Sebagai gambaran adalah pemilikan alat produksi. Pada masyarakat perikanan, alat produksi seperti modal dan peralatan penangkapan, cenderung dikuasai oleh tengkulak. Sementara dalam pertanian, lahan pertanian dan modal dikuasai oleh tuan tanah. Begitu pula dalam hal eksploitasi sumberdaya, yang pada perikanan dilakukan secara bebas (*open access*), tanpa ada batas-batas wilayah yang jelas seperti pada

sumberdaya pertanian. Sumberdaya perikanan juga bersifat milik bersama (*common property*), sehingga siapa saja yang menguasai atau memiliki modal dan sarana penangkapan adalah mereka yang mampu meningkatkan hasil tangkapan. Oleh sebab itu, dalam perikanan penguasaan sumberdaya lebih ditentukan oleh faktor kepemilikan modal dan penguasaan teknologi.

Kesalahan yang paling sering terjadi dalam pengembangan masyarakat di negara berkembang adalah kurangnya memperhitungkan kondisi lokal sasaran program. Sebagai contoh adalah perubahan alat tangkap padat modal yang cenderung menghadirkan investor luar yang bukan nelayan, sehingga dapat mengarah pada terjadinya konflik sosial. Kasus di Papua New Guinea misalnya, memperlihatkan bahwa masuknya investor luar telah menimbulkan salah paham soal pembayaran ikan umpan pancing yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada. Masuknya investor luar yang membawa dampak pada kesenjangan sosial yang tidak dapat teratasi itulah yang seringkali membawa konflik wilayah penangkapan (Pollnac, 1991). Pada tahap ini juga dimungkinkan terjadinya suatu hubungan antara nelayan kecil yang ingin mempertahankan hidupnya (hak atas subsistensi) dengan pemilik modal yang memberikan bantuan dengan menarik keuntungan atas bantuan yang diberikan.

Program pengembangan masyarakat yang tidak memperhatikan keunikan pola hubungan kerja yang terjadi pada umumnya akan selalu menemui kegagalan. Sebagai contoh adalah kegagalan koperasi nelayan

yang dikembangkan, seringkali terjadi karena tidak memperhitungkan organisasi kerja nelayan yang dibentuk berdasarkan pada jalinan kekerabatan. Oleh karena itu, asumsi dasar yang melandasi kebijaksanaan pengembangan masyarakat nelayan selama ini perlu ditinjau kembali. Satu hal yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah perlunya identifikasi tentang respon nelayan terhadap lingkungan dan perubahan sosial yang terjadi. Oleh sebab itu, terasa penting untuk mengerti pola adaptasi nelayan terhadap perubahan lingkungan, baik fisik maupun sosial agar intervensi-intervensi yang dilakukan akan lebih cocok dengan kebutuhan hidup masyarakat nelayan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik adanya dua permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu: pertama, upaya-upaya apa yang dilakukan nelayan dalam mengatasi ketidakberdayaan yang dialami; kedua, program-program intervensi apa saja yang pernah dikembangkan sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat nelayan, dimana letak kelebihan dan kelemahan masing-masing program intervensi tersebut, serta seberapa jauh program intervensi efektif mengatasi ketidakberdayaan masyarakat nelayan.

B. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Ada dua tujuan yang ingin dicapai dari studi pemberdayaan ini, yaitu:

1. Melakukan identifikasi upaya-upaya yang dilakukan masyarakat nelayan dalam mengatasi kebutuh-

an hidupnya, baik kebutuhan melaut maupun kebutuhan pokok rumahtangganya. Dari identifikasi ini diharapkan akan dapat diketahui upaya-upaya apa yang sudah dilakukan secara internal oleh masyarakat nelayan dalam memberdayakan dirinya.

2. Melakukan kajian program-program intervensi yang selama ini dikembangkan pada masyarakat nelayan, dan bagaimana efektifitasnya dalam pengembangan masyarakat nelayan. Dari sini diharapkan dapat diketahui berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak eksternal, dalam hal ini pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi sosial yang lain, dalam membantu menangani masalah pemberdayaan nelayan.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dirumuskan suatu model bagi pemberdayaan masyarakat nelayan. Tentu saja model yang dihasilkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu model yang dihasilkan paling tidak dapat menjadi semacam asumsi dasar yang perlu dipertimbangkan oleh pihak manapun dalam upaya mengembangkan masyarakat nelayan. Istilah "mengembangkan" sengaja digunakan di sini, karena dalam pemberdayaan yang ingin dicapai bukan hanya sekedar peningkatan pendapatan, melainkan juga kemampuan masyarakat itu secara mandiri dalam memenuhi kebutuhannya, tanpa harus mengalami eksploitasi dari pihak lain.

Bismillah.....

**Selamat Mencoba
Membuat Latar Belakang yang Benar
Dengan Ketekunan dan Berlatih
terus-menerus.....**